



Soeharto Bukan Dilengserkan Melainkan Mundur: Narasi dalam Pembelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII

***Farah Febrivi Sianipar**

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
Email: farahfebrivi00@gmail.com

Helrima Sari Siregar

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
Email: helrimasarisiregar06@gmail.com

Ivan Fadhillah M. R.

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
Email: ivanfadila1173@gmail.com

Michael Martius Sigalingging

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
Email: mukomuko378@gmail.com

*Korespondensi

Article History: Received: 24-09-2022, Revised: 10-11-2022 Accepted: 10-11-2022, Published: 29-12-2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden yang sering disalahpahami sebagai pelengseran. Narasi tersebut juga didapat dalam diskusi dan pembahasan pada Kompetensi Dasar yakni, Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas XII. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa presiden Soeharto bukan dilengserkan melainkan mengundurkan diri dengan melihat aspek legalitas formal dan peristiwa sejarah. Tentunya ada desakan dan tuntutan yang luarbiasa dari mahasiswa, tokoh politik dan masyarakat agar presiden Soeharto mundur dari presiden Republik Indonesia. Pengunduran Soeharto dapat dijadikan materi pengayaan khususnya dalam materi Orde Baru dan Reformasi kelas XII. Sehingga diharapkan peserta didik mampu berpikir kritis dan menganalisis mengenai dinamika pemerintahan, transisi kekuasaan serta undang-undang mengenai jabatan dan pengunduran presiden Indonesia.

Kata Kunci:

Orde Baru; reformasi; Soeharto; transisi kekuasaan

Abstract

This study aims to describe Soeharto's resignation as president, which is often misunderstood as a resignation. The narrative is also obtained in discussions and discussions on Basic Competencies, namely, Analyzing the development of the political and economic life of the Indonesian nation in the early days of the Reformation in the subject of Indonesian History class XII. This study uses descriptive qualitative research

methods. Data collection is done by literature study and document analysis. The results of the study show that President Soeharto was not deposed but resigned by looking at the aspects of formal legality and historical events. Of course, there is tremendous pressure and demand from students, political leaders and the public for President Soeharto to step down from being president of the Republic of Indonesia. Soeharto's resignation can be used as enrichment material, especially in the New Order and Reform class XII material. So that students are expected to be able to think critically and analyze the dynamics of government, the transition of power and the laws regarding the position and resignation of the Indonesian president.

Keywords:

new order; reformation; Soeharto; transition of power



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Presiden Soeharto meminta maaf atas kesalahannya dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa, menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presidennya, Bacharuddin Jusuf Habibie (selanjutnya disebut Habibie), dalam upacara yang disiarkan secara nasional (Aspinall & Fealy, 2010). Setelah pernyataan pengunduran dirinya singkat, dia mengarahkan mikrofon ke arah Habibie, yang langsung mengambil sumpah jabatan sebagai hakim yang memegang Al-Quran di atas kepala Habibie.

Soeharto kemudian maju, menjabat tangan Habibie, tersenyum dan berjalan menyusuri barisan hakim sambil tersenyum dan berjabat tangan (Mujiburohman, 2020). Dia memberi hormat kecil kepada para penonton dan berjalan pergi. Sepanjang upacara yang singkat dan menyakitkan pagi ini, Soeharto tidak pernah kehilangan senyum lembut yang dia tunjukkan kepada rakyatnya selama tiga dekade terakhir. Dia menyimpulkan, "Saya akan mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Anda dan saya minta maaf atas kesalahan saya, dan saya berharap negara Indonesia akan hidup selamanya."

Saat ia memberi jalan pada tekanan domestik dan internasional yang meningkat untuk mengundurkan diri. Soeharto secara berhati-hati seperti biasa, untuk melakukan tindakannya secara konstitusional, dan mengatakan kekuasaan akan ditransfer ke Wakil Presiden di bawah prosedur hukum (Vandijk, 2001). Dia tidak menyebutkan pemilihan apa pun, seperti yang dia usulkan awal pekan ini, dan mengatakan bahwa Habibie akan menjalani sisa masa jabatan Soeharto, yang berakhir pada 2003.

Meskipun Soeharto telah menyarankan agar dia bertindak sebagai negarawan yang lebih tua, hari ini dia tidak memberikan indikasi tentang perannya di masa depan. Habibie, 61 tahun, penasihat lama Soeharto dan Menteri Riset dan Teknologi, memiliki sedikit basis politik independen dan selama kariernya bergantung pada Soeharto (Eddyono, 2018). Para pengunjuk rasa mahasiswa, yang bereaksi dengan gembira atas pengumuman Soeharto, telah menuntut pengunduran diri Presiden selama tiga bulan dengan protes yang memuncak ketika mereka menduduki parlemen. Mereka juga telah mengindikasikan bahwa mereka tidak akan puas dengan pengangkatan Habibie, yang memiliki sedikit dukungan di dalam

militer yang kuat dan telah memusuhi para ekonom dan investor asing (Fikri & Hasudungan, 2022a).

Pada upacara tersebut, Soeharto mengatakan keputusannya "berdasarkan pemahaman saya bahwa reformasi harus dilakukan secara damai dan konstitusional demi persatuan." Kemudian, sambil melihat teksnya, dia berkata, "Saya membaca pernyataan ini hari ini, Kamis, 21 Mei 1998, pernyataan pengunduran diri saya sebagai presiden Indonesia." Para pejabat dan reporter yang berkumpul di ruang resepsi di kediaman resminya tampak menahan napas saat dia berbicara, dan tidak ada gemerisik reaksi. Soeharto tampak santai dan tersenyum, dalam setelan santai abu-abu dengan pin pegawai negeri berwarna emas di kemejanya, menyesuaikan mikrofon ke tingkat yang nyaman dan mengeluarkan kacamata dari sakunya saat seorang ajudan menyerahkan teksnya. Setelah pidato selesai, saluran televisi milik negara kembali ke program musik pop.

Setelah Soeharto berbicara, para hakim melewati Habibie dan menjabat tangannya. Presiden baru, seorang pria kecil, tampak hampir tersesat di antara kerumunan pejabat. Yang membuat bingung para penonton, Habibie mengikuti Soeharto keluar dari aula tanpa membuat pernyataan kepada penonton di seluruh negeri. Seluruh prosedur memakan waktu kurang dari 10 menit. Menteri Pertahanan Wiranto melangkah ke mikrofon dan mengatakan militer "mendukung dan menyambut baik pengunduran diri Presiden Soeharto," dan menjanjikan dukungannya kepada Habibie. Dia juga mengatakan bahwa militer akan menjamin keselamatan keluarga Soeharto (Naimah, 2015).

Juru bicara pemerintah saat itu, Alwi Dahlan, melanjutkan dengan pernyataan singkat yang menegaskan bahwa Indonesia akan menjaga komitmen internasionalnya, termasuk kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Gedung DPR tetap ditempati oleh anggota gerakan mahasiswa nasional yang menggempleng negara pasif secara politik berpenduduk lebih dari 200 juta ini hanya dua bulan setelah Soeharto merekayasa pemilihan ulang ritualnya untuk masa jabatan lima tahun ketujuh. Protes mereka memicu kerusuhan besar yang merusak selama tiga hari di Jakarta yang menyebabkan sedikitnya 500 orang tewas dan mengejutkan negara itu menjadi konsensus bahwa Soeharto harus pergi (Kitley, 2002).

Tugas yang dihadapi presiden baru sangat berat. Ekonomi jatuh bebas, dengan kerusuhan berbulan-bulan memperdalam krisis yang telah membawa inflasi, kekurangan pangan, kebangkrutan, dan kelumpuhan bank (Bullard et al., 1998). Mata uang ini bernilai kurang dari 20 persen dari nilainya musim panas lalu. Sedikit yang telah dilakukan untuk melaksanakan paket penyelamatan senilai \$43 miliar yang diselenggarakan pada bulan Oktober oleh Dana Moneter Internasional. "Negara perlu mengambil beberapa langkah ekonomi yang sangat sulit yang bahkan seorang Presiden populer pun akan kesulitan menerapkannya," kata seorang diplomat Barat. "Untuk presiden yang tidak populer, ini hampir tidak mungkin."

Lama dianggap sebagai manipulator politik yang cerdas, Soeharto, akhirnya dikalahkan oleh satu kekuatan yang tidak dapat dia kendalikan – pasar keuangan internasional yang 1997 merusak mata uang negaranya, rupiah, dan menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis ekonomi terburuk sejak Soeharto mengambil alih mengenakan biaya. Rupiah telah kehilangan 75 persen nilainya sejak musim gugur, harga melonjak, banyak perusahaan di sini secara teknis

bangkrut, dan banyak orang Indonesia untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade menjadi lebih miskin (Tarmidi, 2003).

Habibie, berumur 62 tahun pada tahun 1998 seorang insinyur lulusan Jerman yang menyukai proyek-proyek berteknologi tinggi yang mahal, dijadwalkan akan menjabat selama sisa masa jabatan Soeharto, yang berlangsung hingga 2003 (Amir, 2007). Tidak jelas apakah para pengunjuk rasa saat itu akan terus mendesak tuntutan mereka untuk sidang darurat parlemen yang juga bisa memaksa Habibie untuk mengundurkan diri dan membuka jalan bagi pemilu baru yang lebih demokratis.

Pengumuman pengunduran diri Soeharto mencapai klimaks dari salah satu periode 10 hari yang paling luar biasa dalam sejarah Indonesia. Peristiwa dramatis dan bergerak cepat dimulai Selasa, 12 Mei 1998, ketika pasukan menembaki mahasiswa tak bersenjata yang berdemonstrasi di Universitas Trisakti Jakarta yang bergengsi, menewaskan enam orang dan memicu curahan kemarahan di jalan-jalan ibu kota. Lebih dari 500 orang tewas dalam kerusuhan di kota itu dua hari kemudian, dan Soeharto mempersingkat kunjungan resmi ke Kairo untuk pulang ke negara dan ibukota dalam pemberontakan terbuka (Astuti, 2014).

Baity & Adi (2016) dalam penelitiannya menjelaskan, bahwa persepsi aktivis mahasiswa tahun 1998 berpikir yang dilakukan oleh mereka adalah perjuangan yang perlu ditegakkan mengingat Soeharto telah melakukan kekerasan kepada mahasiswa 1998 dalam upaya melengserkan Soeharto dari kursi presiden Republik Indonesia. Lebih lanjut Baity & Adi (2016) menyampaikan, gerakan mahasiswa 1998 semakin kuat gerakannya karena selain krisis politik, juga bersamaan dengan krisis ekonomi tahun 1998 yang memperparah kondisi kebangsaan Indonesia. Sedangkan, Solihutaufa (2022), bahwa sebenarnya sebelum kejatuhan Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia, Soeharto telah secara hukum dan formal menyatakan diri untuk mengundurkan diri sebagai presiden Republik Indonesia. Artinya, sebelum mahasiswa dan rakyat berhasil menggulingkan atau melengserkan Soeharto, terlebih dahulu Soeharto mengundurkan diri dari jabatan yang telah dipegang selama hampir 32 tahun lamanya.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengunduran Soeharto sebagai presiden yang sering disalahpahami sebagai bentuk upaya melengserkan, terlepas adanya desakan dari masyarakat. Faktanya Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden sebelum dijatuhkan oleh masyarakat. Kesalahpahaman itu bukan saja terjadi dalam perdebatan politik di media, tetapi juga dalam pembelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII. Sehingga penelitian ini dapat dipandang berkontribusi sebagai materi pengayaan untuk siswa kelas XII Sejarah Indonesia perihal Orde Baru dan reformasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Mengingat peneliti berupaya mendeskripsikan narasi yang berkembang dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas XII Sekolah Menengah Atas (SMA) mengenai Soeharto dilengserkan atau mundur sebagai presiden Republik Indonesia. Sugiyono (2017) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah deskriptif. Artinya, data yang terkumpul lebih berupa kata-kata daripada angka. Selain itu, Gay (2006) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah

pengumpulan, analisis, dan interpretasi data naratif dan visual yang komprehensif untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena tertentu. Di sisi lain, Creswell (2018) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyelidiki kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau materi. Lebih jauh lagi, tujuan penelitian kualitatif difokuskan untuk mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena tertentu seperti, lingkungan, proses, atau bahkan kepercayaan. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data kemudian mendeskripsikannya. Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dan analisis dokumen (Fikri & Hasudungan, 2022b). Peneliti mencari artikel jurnal berkualitas yang ada dalam database Google Scholar, SAGE reference Online, Directory of Open Access Journal, Science Direct, Elsevier, dan Sinta. Dokumen yang dimaksud adalah undang-undang reformasi, surat pengunduran diri presiden Soeharto, Keputusan MPR.

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi teknik analisis interaktif dari Miles & Huberman (1994) yang terdiri reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, reduksi data: proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data 'mentah' yang muncul dalam catatan lapangan tertulis. Pengurangan data terjadi secara terus menerus sepanjang umur proyek yang berorientasi kualitatif. Ini adalah bagian dari analisis. Kedua, penyajian data: tahapan kedua dari aktivitas analisis adalah tampilan data. 'penyajian' adalah kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk tampilan yang paling sering untuk data kualitatif adalah teks naratif. Ketiga, penarikan kesimpulan/verifikasi: Kegiatan analisis yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif mulai memutuskan apa yang dimaksud dengan sesuatu, mencatat keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, arus sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Pengunduran Diri Soeharto

Presiden Soeharto yang terkepung di Indonesia mengundurkan diri pagi ini dari jabatan yang telah dipegangnya selama 32 tahun, dikalahkan oleh meningkatnya kerusuhan rakyat dan ekonomi yang runtuh yang tidak dapat ia bangkitkan kembali (Pahlawan et al., 2022). Wakil presiden pilihannya, B.J. Habibie, langsung dilantik sebagai kepala negara berpenduduk terbesar keempat di dunia itu. "Saya memutuskan dengan ini menyatakan bahwa saya mundur dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia," kata Soeharto membacakan keterangan singkat di Istana Merdeka. Kepada para menteri dan pembantu kabinet yang hadir, dia berkata, "Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya jika ada kesalahan, kegagalan, dan kekurangan."

Pengunduran diri Soeharto membawa curahan kegembiraan dan kelegaan dari ribuan mahasiswa yang telah menduduki halaman parlemen negara, berkemah di sana semalaman untuk menekan tuntutan mereka agar presiden mundur (Jubaedah, 2019). Ketika dia membaca kata-kata "Saya mundur," para siswa - yang

telah memelopori revolusi populer ini - berteriak keras, berlutut dalam doa, melompat ke air mancur di luar ruangan, dan melemparkan blazer sekolah mereka yang berwarna cerah ke udara. Pernyataan singkatnya, yang dibaca hanya dalam lima menit, menandai transisi presiden kedua dalam lima dekade Indonesia sebagai negara merdeka. Itu adalah akhir yang memalukan bagi pemimpin terlama di Asia, yang datang untuk mempersonifikasikan gaya kepemimpinan otoriter dan paternalistik di kawasan itu. Kepergian Soeharto, dan pengambilan sumpah teman dan sekutu lamanya Habibie, membuka babak baru dan tidak pasti dalam sejarah negara ini. Para pengunjuk rasa dan kritikus anti-pemerintah telah mendesak untuk "reformasi," atau reformasi, yang berarti perombakan total rezim Soeharto - dan Habibie dipandang sebagai bagian dari sistem itu.

Bahkan ketika seruan untuk pengunduran dirinya semakin keras - dan dengan beberapa mantan menternya sendiri, pensiunan jenderal, dan sekutu lama di partai Golkar yang berkuasa bergabung dengan paduan suara yang meningkat - Soeharto, seorang mantan jenderal, masih mencoba mendikte waktu dan syarat keberangkatannya. Pada hari Selasa, Soeharto mengundang sembilan ulama atau cendekiawan Muslim yang dihormati, ke pertemuan tertutup di Istana Merdeka, dan muncul 2, 5 jam kemudian untuk memberi tahu pemirsa televisi nasional bahwa ia bersedia untuk mundur, tetapi hanya setelah transisi. periode yang akan dimulai dengan pembentukan "dewan reformasi" dan mengarah pada pemilihan baru untuk parlemen nasional. Parlemen itu kemudian akan memilih presiden baru, dan, kata Soeharto, dia tidak akan menjadi calon (Richburg, 1998).

Tapi bukannya menenangkan para mahasiswa dan pemimpin oposisi yang menuntut penggulingannya, pengumuman Soeharto hari Selasa hanya memicu seruan mereka untuk segera mengundurkan diri. Sementara banyak akademisi Indonesia dan lainnya mengatakan mereka melihat tawaran Soeharto sebagai kompromi yang masuk akal, kritikusnya yang semakin vokal melihatnya sebagai taktik mengulur-ulur yang akan memungkinkan dia untuk tetap menjabat selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tetapi sementara banyak suara menentang Soeharto bersatu dalam menginginkan pengunduran dirinya segera, mereka kurang fokus, dan sebagian besar tidak jelas, pada siapa yang mereka inginkan untuk menggantikannya.

Beberapa pengunjuk rasa mahasiswa telah menawarkan kepresidenan Habibie. Habibie telah lama dipandang sebagai salah satu orang kepercayaan terdekat Soeharto, seorang teman lama yang menyebut presiden sebagai semacam figur ayah dan kadang-kadang hanya sebagai "SGS," yang merupakan singkatan dari "Super Genius Soeharto." Bagi para pengkritiknya, Habibie telah menjadi simbol eksekusi kekuasaan Soeharto – perlakuan yang menguntungkan bagi teman-teman dan rekan-rekan, yang usaha bisnis pribadinya telah dibantu untuk berkembang.

Persahabatan yang tidak biasa antara Soeharto dan Habibie dimulai lebih dari empat dekade lalu, ketika Soeharto, sebagai perwira muda, ditempatkan di pulau Sulawesi, Indonesia, di seberang Habibie, seorang bocah lelaki berusia 13 tahun yang ayahnya baru saja meninggal. Tunduk pada kehendak rakyatnya yang semakin marah, Presiden Indonesia Soeharto yang lelah dan lesu mengundurkan diri pada hari Kamis, membawa 32 tahun pemerintahan otoriter berakhir secara tiba-tiba dan dramatis (Supriyanto, 2022). "Saya percaya bahwa menjadi sangat sulit bagi saya untuk melanjutkan kepemimpinan negara ini dan untuk memupuk pembangunan negara kita," kata Soeharto, mengumumkan apa yang disebutnya

"penarikannya" dari kursi kepresidenan dalam pidatonya di depan bangsa. pada pukul 9 pagi Kamis. "Saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya jika ada kesalahan, kegagalan atau kekurangan," ujarnya dengan suara terbata-bata. Wakil Presiden Bucharuddin Jusuf Habibie langsung dilantik sebagai presiden negara terpadat keempat di dunia itu. Soeharto mengatakan Habibie tidak akan menjadi juru kunci tetapi akan menyelesaikan sisa masa jabatan presidennya, yang berlangsung hingga 2003.

Segera setelah Habibie dilantik, Jenderal Wiranto, menteri pertahanan dan kepala militer, membuat pernyataan yang mendukung transisi kepemimpinan. Dia juga memperingatkan orang Indonesia untuk "menghindari kerusuhan." Soeharto keluar saat pengunjuk rasa mahasiswa berkemah sebagai protes di kompleks parlemen Indonesia, dan setelah ketua parlemen mengancam akan memecatnya dari kantor jika dia tidak pergi sendiri. Posisi politik presiden terurai dengan cepat. Pengunduran dirinya datang hanya seminggu setelah kerusuhan kekerasan merenggut sedikitnya 500 nyawa di Jakarta, memaksa militer untuk mengirim tank dan pasukan untuk menjaga ketertiban. Ketua DPR RI, Harmoko, Rabu mengumumkan bahwa jika presiden tidak mengundurkan diri pada Jumat, ia akan mengadakan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang memiliki kekuasaan untuk menunjuk presiden dan wakil presiden baru.

Indonesia telah diterpa krisis ekonomi yang mengikis dukungan untuk Soeharto dan memicu serangkaian protes oleh mahasiswa (Ma'arif, 2011). Pekan lalu, protes itu menyebar ke kaum miskin kota, yang terpukul keras oleh kenaikan harga yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kesengsaraan ekonomi. Dalam pidato pengunduran dirinya, Soeharto mengatakan dia telah "mengikuti dengan sangat hati-hati" peristiwa baru-baru ini di Indonesia, "terutama aspirasi rakyat kita untuk melembagakan reformasi di seluruh bidang, di semua aspek kehidupan kita dan bangsa kita."

Sebagai tanggapan, Soeharto mengatakan dia telah menyerukan perombakan kabinetnya dan pembentukan komite reformasi. Namun dia mengatakan ada kurangnya konsensus tentang bagaimana membentuk komite, yang membawanya pada keputusan untuk meninggalkan perubahan Kabinet dan, sebaliknya, meninggalkan jabatannya sebagai pemimpin Indonesia, yang telah dia pegang sejak 1965.

Pengunduran Soeharto dalam Materi Orde Baru dan Reformasi Sejarah Indonesia kelas XII

Kompetensi Dasar (KD) yang penulis sampaikan di atas adalah pembelajaran yang secara khusus memuat materi mengenai Orde Baru dan Reformasi. Artinya, kesalahpahaman dalam menginterpretasi peristiwa sejarah, seperti bahwa, Soeharto mundur sebagai presiden Republik Indonesia, sebelum berhasil digulingkan paksa oleh mahasiswa dan rakyat saat itu. Soeharto tidak dimakzulkan atau dipecat sebagai presiden, tetapi mundur. Terlepas ini strategi atau bukan, demikianlah fakta sejarahnya.

Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Indikator Sejarah Indonesia kelas XII

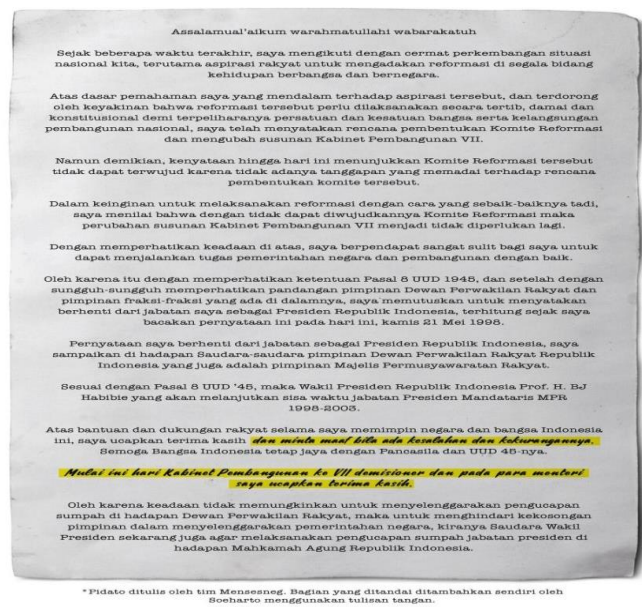
Kompetensi Dasar	Indikator
Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada	1. Menganalisis kejadiankejadian pada masa akhir Orde Baru

masa awal Reformasi

2. Membandingkan antara ciri-ciri pemerintahan pada masa Orde Baru dan masa Reformasi.
3. Menjelaskan makna Reformasi.
4. Menganalisis masa akhir Orde Baru.

Buku sejarah Indonesia kelas XII yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2018 menjelaskan bahwa Presiden Soeharto mundur bukan lengser. Narasi yang disebutkan dalam buku teks wajib tersebut adalah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 melalui pidato pengunduran dirinya di Istana Negara secara nasional (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2015).

Perdebatan dan kesalahpahaman mengenai apakah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden atau dilengserkan menjadi pembahasan yang menarik untuk siswa kelas XII yang sudah bisa diajak untuk berpikir kritis.



Gambar 1. Pidato Pengunduran Soeharto sebagai Presiden (Fajrian, 2018)

Pemakzulan Presiden Indonesia

Mengenai pemakzulan atau pelengseran presiden di Indonesia sejatinya telah diatur oleh undang-undang. Ketentuan mengenai pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 (Sutiyoso, 2016). Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran. Selanjutnya yang dimaksud dengan 'pelanggaran' dijelaskan dalam Pasal 7A sebagai berikut: (1) pengkhianatan terhadap negara; (2) korupsi; (3) suap; (4) kejahatan berat lainnya; dan (5) perilaku tercela (Hsb, 2017).

Berdasarkan ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, proses pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden adalah sebagai berikut: (1) DPR berpendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum; (2) DPR mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan; (3) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya kepada DPR; (4)

DPR mengajukan usulan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR; dan (5) MPR mengadakan sidang paripurna untuk memutuskan usulan DPR. Lima prosedur pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden dapat dijelaskan lebih lanjut.

Pertama, pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Pendapat DPR bahwa dugaan pelanggaran hukum telah dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat menjadi dasar untuk mengajukan rekomendasi pemakzulan jika didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang. rapat paripurna yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota DPR. Jika pendapat DPR didasarkan pada seberapa banyak atau kurang dukungan politik yang diperoleh anggota DPR, berarti proses merekomendasikan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden dalam rapat paripurna DPR bukanlah proses peradilan. proses, melainkan proses politik.

Kedua, DPR mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan. Setelah DPR menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota DPR, oleh karena itu dakwaan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya kepada DPR. Berdasarkan permintaan DPR, Mahkamah Konstitusi harus memberikan keputusan atas pendapat DPR paling lama 90 hari sejak Mahkamah Konstitusi pertama kali menerima permintaan DPR. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7B ayat (4) UUD 1945.

Keempat, DPR mengajukan usulan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR. Setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan putusan yang menyatakan 'membenarkan pendapat DPR' maka DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian dari jabatannya. presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7B ayat (5) UUD 1945.

Kelima, MPR akan menggelar rapat paripurna untuk memutuskan rekomendasi DPR. Jika MPR menerima usulan DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden, maka MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memutuskan keputusan DPR dalam waktu paling lambat 30 hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7B ayat (6) UUD 1945.

Keputusan MPR untuk memberhentikan (atau tidak) presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 anggota MPR dan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir (Syawawi, 2016). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7B angka (7) UUD 1945. Berdasarkan uraian di atas, prosedur untuk memakzulkan presiden dan/atau wakil presiden memiliki dua tahapan. Tahap pertama adalah pemeriksaan yudisial oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden. Tahap kedua

adalah pengambilan keputusan untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden melalui proses rapat paripurna MPR.

Meski aturan konstitusional tentang pemakzulan sudah jelas, namun perjalanan politik pemerintahan sejak era pemilihan langsung selalu menyertakan seruan dan gerakan untuk menggulingkan presiden di tengah masa jabatannya. Sejarah penyelenggaraan politik Indonesia selama ini menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan nasional seringkali dilakukan dalam kondisi penuh gejolak dan bukan dalam kondisi normal (Widya, 2022).

Presiden Soekarno digulingkan setelah Sidang Istimewa MPRS (MPR sementara) diadakan pada tahun 1967. Presiden Soeharto terpaksa mundur setelah kehilangan dukungan parlemen serta beberapa menteri di kabinetnya ketika gerakan Reformasi 1998 berlangsung. ayunan penuh. Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie memilih untuk tidak mengajukan diri sebagai calon setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR tahun 1999. Presiden Abdurrahman Wahid juga diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR tahun 2001 setelah dianggap telah mengambil langkah inkonstitusional.

Pastinya akan selalu ada kelompok-kelompok yang memprakarsai gerakan untuk menggulingkan presiden, seolah-olah sudah tidak sabar menghadapi pemilihan umum berikutnya untuk memperebutkan kekuasaan. Misalnya, pada tahun 2007 silam ada gerakan “Cabut Mandat” yang dimotori oleh mantan aktivis mahasiswa tahun 1970-an, Hariman Siregar. Gerakan ekstra parlemen menuntut agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mundur dari jabatannya karena pemerintahannya dinilai gagal membawa kemakmuran. Hal penting yang sering dilupakan adalah bahwa gerakan ekstra-parlementer tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membutuhkan struktur politik dan sistem administrasi yang mendukung. Namun sejalan dengan keinginan untuk memperbaiki kehidupan demokrasi di Indonesia, kewenangan untuk memilih dan memberhentikan presiden telah dicabut dan tidak lagi menjadi bagian yang melekat pada MPR. Hal ini dilandasi semangat untuk menciptakan keseimbangan kewenangan antara berbagai cabang kekuasaan.

Soeharto Mengundurkan Diri sebagai Presiden

Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, pemerintahannya selama 32 tahun dijatuhkan oleh gerakan kekuatan rakyat yang menggulingkan pemimpin terlama di Asia dengan kecepatan yang memusingkan. Ditinggalkan oleh kelas menengah yang ia bantu ciptakan dan angkatan bersenjata yang ia cintai dan percayai, Soeharto pergi ke kantor kepresidenannya pada pukul 9 pagi dan, dalam upacara singkat yang disiarkan televisi, menyerahkan kekuasaan kepada wakil presidennya, B. J. Habibie. “Saya percaya semakin sulit bagi saya untuk melanjutkan kepemimpinan negara ini,” kata Soeharto yang berusia 76 tahun dengan suara mantap saat dia berdiri diapit oleh para jenderal, ajudan, dan hakim Mahkamah Agung yang berwajah muram. “Oleh karena itu, menghormati dasar UUD 1945. Saya memutuskan dengan ini menyatakan bahwa saya akan mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia, efektif segera.”

Kejatuhan Soeharto mengingatkan pada penggulingan Ferdinand E. Marcos 1986 di Filipina, di mana pemberontakan yang sebagian besar damai dan populer menjatuhkan seorang presiden yang dulu tak terkalahkan yang telah melumpuhkan oposisi, mengumpulkan kekayaan pribadi yang tak terukur dan kehilangan kontak dengan rakyatnya, negaranya dan dunia yang berubah. Secara signifikan, Panglima

Angkatan Bersenjata, Jenderal Wiranto, segera menjanjikan kesetiaan pasukannya kepada Habibie—seorang pria yang tidak disukai oleh militer—dan mengatakan tentara akan melakukan “upaya keras” untuk melindungi keluarga Soeharto dan anggota-anggotanya yang akan keluar parlemen.



Gambar 2. Pengunduran Diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2015)

Tampaknya tidak mungkin Soeharto harus meninggalkan negaranya, seperti yang dilakukan Marcos di Filipina. Tetapi tidak jelas apakah Habibie akan menjadi presiden sementara atau menyelesaikan masa jabatan Soeharto, yang akan berakhir pada tahun 2003. Sebagian besar pengamat menduga dia akan dilengserkan oleh para jenderal dengan cara yang setidaknya tampak konstitusional. Kecepatan mundurnya Soeharto dari kekuasaan mengejutkan 200 juta orang Indonesia, populasi Muslim terbesar di dunia. Itu terjadi pada hari libur keagamaan nasional ketika toko-toko tutup dan jalan-jalan kosong, dan tanggapan publik pada awalnya tidak terdengar. Namun para siswa bersorak, menangis dan berdoa dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan pasti menyambut kabar tersebut dengan lega dan gembira.

Hari demi hari minggu ini, satu demi satu kelompok bergabung dengan demonstran mahasiswa menyerukan demokrasi dan pengunduran diri Soeharto. Partai Golkar sendiri bergabung dengan pemberontakan, menyuruhnya untuk mundur pada hari Jumat, 15 Mei 1998, atau menghadapi panggilan dalam sidang khusus Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ultimatum—yang datang bahkan ketika Menteri Luar Negeri Madeleine Albright untuk pertama kalinya secara terbuka meminta pemimpin Indonesia itu mundur dari jabatannya untuk mengakhiri krisis politik dan ekonomi bangsanya—membuat Soeharto tidak punya pilihan dan tidak punya landasan dukungan. Pemanggilan sidang darurat akan memenuhi tuntutan militer yang kuat agar pergantian kepemimpinan menjadi konstitusional. Memang, seluruh perjanjian transisi hampir pasti direkayasa oleh angkatan bersenjata.

Presiden Clinton menyambut baik keputusan Soeharto dan mendesak para pemimpin Indonesia untuk bergerak maju dengan “proses damai” yang didukung oleh rakyat, lapor Reuters. Dia mengatakan Amerika Serikat siap mendukung Indonesia dalam upaya menciptakan demokrasi yang stabil. Awal hari ini di Asia, sebagian besar pasar saham yang terkepung di kawasan itu bersatu karena berita pengunduran diri Soeharto. Pasar Malaysia naik 2,4%, pasar Jepang naik 1,5% dan Singapura melonjak 2,5%. Pasar Indonesia ditutup untuk liburan.

Soeharto, seorang mantan jenderal yang cerdas dan tangguh, telah bermanuver sampai akhir, membuat konsesi besar yang pada dasarnya mewakili kemenangan bagi mahasiswa. Dalam perkembangan Soeharto tampaknya memberikan oposisi apa yang diinginkannya - setuju untuk melakukan reformasi politik, nama Kabinet baru dan mengadakan pemilihan baru di mana ia tidak akan menjadi kandidat.

Namun perlawanan terhadap kekuasaannya terus berlanjut, sebagian karena dia tidak menetapkan jadwal untuk mundur. Akhir Soeharto adalah hasil dari gerakan rakyat yang mendapat dukungan luas setelah enam mahasiswa ditembak mati oleh pasukan keamanan 12 Mei (Himawan et al., 2022). Bab terakhir pemerintahan Soeharto ditulis pada hari Rabu ketika 40.000 tentara Indonesia yang didukung oleh tank dan anjing penyerang mengambil alih Jakarta. Penumpukan militer besar-besaran, yang terjadi saat Jakarta tertidur, memaksa para pembangkang untuk membatalkan rapat umum di pusat kota yang mereka katakan akan membuat 1 juta pengunjung rasa anti-Soeharto turun ke jalan. Keputusan mereka mungkin telah mencegah pertumpahan darah, kata para diplomat (Hadiz, 2000).

Amien Rais, yang telah muncul sebagai tokoh oposisi paling terkemuka di Indonesia, mengatakan bahwa dia membatalkan rapat umum pada jam kesebelas setelah seorang jenderal meneleponnya untuk memperingatkan bahwa Lapangan Tiananmen lain sedang dibuat—merujuk pada pembantaian tahun 1989 di Beijing terhadap ratusan orang, dan mungkin ribuan, pengunjung rasa. Terlepas dari unjuk kekuatan di Jakarta, komando militer membiarkan mahasiswa melanjutkan pendudukan mereka di gedung dan halaman parlemen Negara (Zarkasyi, 2008). Di kota-kota lain, sebanyak 1 juta orang, termasuk 500.000 di Yogyakarta, berbaris damai. Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah runtuhnya dukungan untuk kepresidenannya selama 32 tahun. Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih kursi kepresidenan.

Kesimpulan

Perdebatan apakah presiden Soeharto dilengserkan atau mengundurkan diri seharusnya pada era yang demokratis dan globalisasi dapat dimaklumi. Hanya saja, dalam penelitian ini peneliti mengambil sikap dengan mempertimbangkan aspek legalitas formal dan peristiwa sejarah yang terjadi maka peneliti menyatakan bahwa presiden Soeharto mengundurkan diri. Benar, bahwa tentunya ada desakan dan tuntutan yang luarbiasa dari mahasiswa, tokoh politik dan masyarakat agar presiden Soeharto mundur dari presiden Republik Indonesia. Tetapi, tidak seperti tokoh diktator militer di Negara lain yang menjabat sebagai presiden yang dalam detik-detik terakhir harus dilengserkan karena mempertahankan kekuasaan presiden. Berbeda dengan hal tersebut, presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, presiden digantikan oleh wakil presiden saat

itu, B.J Habibie. Dengan demikian pengunduran Soeharto dapat dijadikan materi pengayaan khususnya dalam materi Orde Baru dan Reformasi kelas XII mata pelajaran Sejarah Indonesia. Sehingga diharapkan peserta didik mampu berpikir kritis dan menganalisis mengenai dinamika pemerintahan, transisi kekuasaan serta undang-undang mengenai jabatan dan pengunduran presiden Indonesia.

Referensi

- Amir, S. (2007). Symbolic Power in a Technocratic Regime: The Reign of B.J. Habibie in New Order Indonesia. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 22(1), 83–106. <http://www.jstor.org/stable/41308087>
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2015). *Naskah Sumber Arsip Presiden RI: Soeharto*. <https://anri.go.id/download/naskah-sumber-arsip-seri-presiden-ri-soeharto-1586394992>
- Aspinall, E., & Fealy, G. (2010). Introduction: Soeharto's New Order and its Legacy. In E. Aspinall & G. Fealy (Eds.), *Soeharto's New Order and Its Legacy* (Vol. 2, pp. 1–14). ANU Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt24hc65.7>
- Astuti, W. W. (2014). Formasi Ideologi Pada Cerpen “Dzikir Sebutir Peluru” Karya Agus Noor: Analisis Hegemoni Gramscian. *Medan Makna*, 12(2), 121–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.26499/mm.v12i2.1034>
- Baity, A. N., & Adi, A. S. (2016). Persepsi Aktivistis Mahasiswa 1998 Tentang Demonstrasi Tahun 1998 Dalam Rangka Menurunkan Soeharto. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 03(04), 1675–1690. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/16951>
- Bullard, N., Bello, W., & Mallhotra, K. (1998). Taming the Tigers: The IMF and the Asian Crisis. *Third World Quarterly*, 19(3), 505–555. <http://www.jstor.org/stable/3993136>
- Creswell, J. W. (2018). *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Eddyono, L. W. (2018). The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.31078/jk1511>
- Fajrian. (2018, May 21). Pidato Pengunduran Diri Presiden Soeharto. *CNNIndonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180520173928-23-299791/pidato-pengunduran-diri-presiden-soeharto>
- Fikri, A., & Hasudungan, A. N. (2022a). The Nasionalisasi-Investasi Perusahaan Asing, Mafia Berkeley dan Berakhirnya Rezim Presiden Soekarno. *Yupa: Historical Studies Journal*, 5(2), 46–60. <https://doi.org/10.30872/yupa.v5i2.784>
- Fikri, A., & Hasudungan, A. N. (2022b). Siauw Giok Tjhan and Abdurrahman Wahid: History of Chinese Citizenship in Indonesia. *Journal of Education, Society & Multiculturalism*, 3(1), 181–200. <https://doi.org/10.2478/jesm-2022-0011>

- Hadiz, V. R. (2000). Retrieving the Past for the Future? Indonesia and the New Order Legacy. *Southeast Asian Journal of Social Science*, 28(2), 11–33. <http://www.jstor.org/stable/24492956>
- Himawan, E. M., Pohlman, A., & Louis, W. (2022). Revisiting the May 1998 Riots in Indonesia: Civilians and Their Untold Memories. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(2), 240–257. <https://doi.org/10.1177/18681034221084320>
- Hsb, A. M. (2017). Putusan Final Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pemakzulan Presiden. *Legislasi Indonesia*, 14(3), 275–284. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.101>
- Jubaedah, S. (2019). Gerakan Mahasiswa (Kajian Tentang Peranan Mahasiswa Universitas Trisakti Pada Mei 1998 Dalam Proses Pergantian Kekuasaan Orde Baru). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 18–40. <https://doi.org/10.36706/jc.v8i2.9245>
- Kitley, P. (2002). Televisi Bangsa Baru: Television, Reformasi and Renewal in Indonesia. *Media International Australia*, 104(1), 92–106. <https://doi.org/10.1177/1329878X0210400111>
- Ma'arif, S. (2011). "Rent Seeking Behaviour" dalam Relasi birokrasi dan Dunia Bisnis. *NATAPRAJA*. <https://doi.org/10.21831/jnp.v0i0.3264>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2nd Edition* (2nd ed.). Sage Publications.
- Mujiburohman, D. (2020). The Practice of Presidential Succession in Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 07(02), 250–267. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a6>
- Naimah, H. (2015). Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 12(2). <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.518>
- Pahlawan, J., Salama, N., & Ulfah, S. (2022). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 10–19. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.54>
- Richburg, K. B. (1998, May 21). Suharto Resigns, Names Successor. *Washington Post*. <https://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/indonesia/stories/resignation052198.htm>
- Solihutaufa, E. (2022). Pers Dalam Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Dialektika Politik*, 6(2), 152–174. <https://doi.org/10.37949/jdp.v6i2.17>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Supriyanto, S. (2022). Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(2), 66–74. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i2.15>
- Sutiyoso, B. (2016). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 091. <https://doi.org/10.31078/jk716>

- Syawawi, R. (2016). Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan). *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 051. <https://doi.org/10.31078/jk763>
- Tarmidi, L. T. (2003). Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 1(4), 1–25. <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i4.183>
- Vandijk, K. (2001). Soeharto's Resignation. In *A Country in Despair* (pp. 185–216). BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004434875_010
- Widya, U. (2022). Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 194–208. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art15>
- Zarkasyi, H. F. (2008). The Rise Of Islamic Religious-Political Movements In Indonesia: The Background, Present Situation and Future. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 2(2), 336. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2008.2.2.336-378>